

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BELANJA MODAL DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Oleh :

Lis Djuniar¹⁾
Dosen Tetap Yayasan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang
Email : lisdjuniar@gmail.com Hp : 082182521171

Ida Zuraida²⁾
Dosen Tetap Yayasan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah
Palembang
Email: ida.zur@gmail.com

Info Artikel :

Diterima : 13 Agust 2018
Direview : 15 Agust 2018
Disetujui : 10 Okt 2018

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Regional Original Income, Capital Expenditures and More Budget Financing on the Performance of District / City Regional Governments in South Sumatra Province in 2012-2016 with a total sample of 75 samples. This type of research is associative research. The data used in this study are primary data and secondary data. Data collection methods used in this study use the documentation method. Data analysis in this study uses qualitative analysis. The results in this study can be concluded that the Regional Original Income does not affect the Performance of the District / City Regional Government of South Sumatra Province. Capital expenditure does not affect the performance of the Regency / City regional government of South Sumatra Province. More Budget Financing Remains negatively affect the performance of local governments. Simultaneously Regional Original Revenue, Capital Expenditures and More Budget Financing Remains simultaneously affect the Performance of Regency / City Regional Government of South Sumatra Province. This result shows that if there is an increase of the Budget Financing Remaining, the assessment of Local Government Performance has decreased and vice versa if there is a decrease in the Budget Financing Remaining then the performance of the Regency / City Regional Government of South Sumatra Province has increased.

Keywords *Regional Original Income, Capital Expenditures, Over Budget Financing, Local Government Performance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012-2016 dengan jumlah sampel 75 sampel. Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah

Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

Hasil ini menunjukkan jika ada peningkatan dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran maka penilaian Kinerja Pemerintah Daerah mengalami penurunan dan sebaliknya jika terdapat penurunan pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran maka penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan.

Kata Kunci PAD, Belanja Modal, SILPA, Kinerja Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Menurut Ulum (2012:20) pengukuran kinerja adalah cara untuk mempertahankan prestasi berbagai pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan pemerintah. Pengukuran kinerja membantu pejabat pemerintah daerah dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan dan juga membantu warga untuk mengevaluasi apakah tingkat pelayanan pemerintah setara dengan uang yang mereka keluarkan untuk pelayanan-pelayanan tersebut.

Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai pengendalian organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system. Anggaran yang telah disusun memiliki peranan sebagai perencanaan dan sebagai kriteria kinerja, yaitu anggaran digunakan sebagai sistem pengendalian untuk mengukur kinerja manajerial. Seiring dengan peranan anggaran tersebut, kunci dari kinerja yang efektif adalah apabila tujuan dari anggaran tercapai dan partisipasi dari bawahan memegang peranan penting dalam mencapai tujuan tersebut.

Menurut Bastian (2006: 267) dalam Fifat dan Nadirsyah (2016: 3) indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impacts*).

Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Julitawati dalam Sri (2017:63) menyatakan bahwa kemampuan suatu daerah dalam menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pengembangan daerah tersebut. Di samping itu

semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Menurut Sudarsana dalam Sri (2017: 63) menyatakan bahwa belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Sehingga semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kinerja daerah akan lebih baik. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akutansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Selain pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja modal dalam laporan realisasi anggaran (LRA) dalam pemerintah daerah juga terdapat dana SILPA sebagai anggaran penutupan defisit suatu daerah sehingga SILPA sangat mempengaruhi APBD suatu daerah. Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dana sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Berdasarkan realisasi anggaran APBD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan maka di dapat beberapa fenomena yang terjadi yang pertama PAD dari 17 Kabupaten/Kota terutama pada tahun 2015 dan 2016 yang mana dapat dilihat dari PAD terdapat 8 Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan dan 9 Kabupaten/Kota mengalami penurunan, dari 8 Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan terdapat 3 Kabupaten/Kota mengalami penurunan nilai EKPPD yaitu Kab. OKUT, Banyuasin dan Linggau, hal ini disebabkan banyaknya target pemerintah dalam bidang pelayanan dan pembangunan pemerintah daerah tidak tercapai secara penuh. Yangmana dapat terlihat dari penurunan belanja modal belanja modal yaitu Kabupaten Lubuk Linggau dan Banyuasin. Selain itu 9

Kabupaten/Kota mengalami penurunan namun nilai EKPPD nya mengalami peningkatan yaitu Musi Banyuasin, Musi Rawas, Muara Enim, Pagar Alam menurunnya nilai PAD dari Kabupaten/Kota tersebut rata-rata di karenakan kurang baiknya pelayanan pajak sehingga masyarakat merasa kesulitan dalam membayar pajak sehingga masyarakat tidak mau mengurus pembayaran pajak baik kendaraan bermotor dan lainnya. Sama halnya dalam belanja modal terdapat 7 Kabupaten/Kota mengalami peningkatan dan 10 Kabupaten/Kota mengalami penurunan contohnya pada Kabupaten Muara Enim, menurunnya belanja modal dikarenakan realisasi menlenceng dari target yang ditentukan disebabkan dari terkendala tender dan proses administrasi sehingga mengalami penurunan pada tahun 2016 yang mana terlihat dari terdapatnya SILPA yang cukup besar. Sama halnya pada Kabupaten Lahat dan Kota Palembang selain terdala administrasi juga terkendala pembiayaan sehingga target belanja modal tidak tercapai/mengalami penurunan ini dapat terlihat juga pada SILPA Kabupaten Kota tersebut pada 2016 tidak ada SILPA. Namun dari 3 Kabupaten tersebut nilai EKPPD nya tetap mengalami kenaikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012-2016.
2. Bagaimana pengaruh belanja modal terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012-2016.
3. Bagaimana pengaruh dana sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012-2016.
4. Bagaimana PAD, belanja modal dan SILPA terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012-2016?

KAJIAN PUSTAKA

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Menurut Sihar (2014:262) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Menurut Muhammad (2017: 496) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah

rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pendapatan Daerah

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Iqbal (2012:141) terdapat 3 (tiga) struktur dalam Anggaran pendapatan dan Pengeluaran Daerah, yaitu pendapatan daerah, dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang sah. Dalam bentuk APBD yang baru, pendapatan juga dibagi menjadi tiga, yaitu PAD, dana perimbangan, dan pendapatan Lain-lain daerah yang sah.

Belanja Daerah

Menurut Permendagri No. 59 Tahun 2007 ada dua yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja daerah adalah semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Meliputi : (a) Belanja Pegawai; (b) Belanja Barang dan Jasa; (c) Belanja Perjalanan Dinas; (d) Belanja Pemeliharaan; (e) Belanja Modal; (f) Bunga; (g) Subsidi; (h) Hibah; (i) Bantuan Sosial; (j) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan; dan (k) Belanja Tidak Terduga.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah. Pendapatan berasal dari berbagai komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan pendapatan lain-lain yang sah.

Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Handoko (2012:72) pendapatan asli daerah berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan laba perusahaan daerah termasuk di dalamnya pendapatan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah. Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak

yang berisi Pajak Daerah dan pos retribusi daerah, pos pene-rimaan non pajak yang berisi hasil perusa-haan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. Undang-undang No. 32 tahun 2004 pasal 157 menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) terdiri atas : (1) hasil pajak daerah, (2) hasil retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) lain-lain PAD yang sah.

Pengertian Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran belanja modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Menurut Mardiasmo (2009) dalam Mulia (2016: 32) belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Kelompok belanja ini mencakup jenis belanja baik untuk bagian belanja aparatur daerah maupun pelayanan publik.

Jenis-Jenis Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran belanja modal digunakan untuk : (a) Belanja modal tanah; (b) Belanja modal peratan dan mesin; (c) Belanja modal gedung dan bangunan; (d) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan; (f) Belanja modal lainnya dan (g) Belanja modal badan layanan umum.

Dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

SILPA ini menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Permendagri 13 tahun 2006 pasal 137 menyatakan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya merupakan pembiayaan yang digunakan untuk :

- a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja,
- b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langung,
- c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Pengertian Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Endang dan Rosmida (2016: 101) kinerja dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang dicapai oleh pegawai pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu periode. Kinerja pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan (MenPAN:2007).

Tujuan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah

Tujuan sistem pengukuran kinerja adalah *pertama*, untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik. *Kedua*, untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi. *Ketiga*, untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence*. *Keempat*, sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional (Asmaul, 2016: 87). Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pengukuran kinerja pemerintah daerah yaitu sebagai cara untuk mempertahankan prestasi atau meningkatkan perstasi pemerintah daerah selain itu mengkomunikasikan secara baik atar pmerinth daerah, mengukur kinerja finansial dan non-finansial, mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer dan untuk mencapai *goal congruence* dan alat untuk mencapai kepuasan.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Daerah

Menurut Mardiasmo (2009) faktor yang mempengaruhi kinerja daerah yaitu *outputs* dan *inputs*, maka semakin besar *outputs* dibanding *inputs*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi, maka proksi pengukuran kinerja pemerintah daerah untuk digunakan dengan rumus efisiensi dan diukur dengan rasio *outputs* dengan *inputs*. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja daerah yaitu *input* dan *output*. Yang mana *input* adalah sumber daya yang digunakan untuk kebijakan, program dan aktivitas dapat berupa pendapatan/penerimaan suatu daerah. Sedangkan *output* adalah hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas dan kebijakan seperti belanja modal dan penilaian kinerja daerah.

Indikator Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Bastian (2006: 267) dalam Fifit dan Nadirsyah (2016: 3) indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan yaitu :

- a. Indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan agar menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan/peraturan perundangundangan, dan sebagainya.
- b. Indikator keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat diperoleh/dicapai dari suatu kegiatan, baik kegiatan yang berupa kegiatan fisik maupun non fisik.
- c. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
- d. Indikator manfaat (*benefit*) adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- e. Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap tingkat indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Menurut Kemendagri 2016 tentang manual tata cara EKPPD yang mana pengertian EKPPD merupakan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dilakukan tim nasional EPPD dibantu oleh tim teknis dan tim daerah melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahunnya.

Tahapan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) yaitu sebagai berikut :

- a) Mencermati laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)
- b) Melakukan konfirmasi, validasi, verifikasi dan klarifikasi data
- c) Menyusun hasil sementara pemerinkatan sebagai bahan pelaksanaan *common senses survey*
- d) Melakukan *common senses survey* terhadap daerah yang berdasarkan hasil peringkat sementara EKPPD
- e) Penetapan peringkat dan setatus kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional.

Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

- H₀₁ : Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja.
- H_{a1} : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah
- H₀₁ : Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah
- H_{a2} : Belanja modal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah
- H₀₃ : SILPA tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah
- H_{a3} : SILPA berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah
- H₀₄ : PAD, Belanja Modal dan SILPA tidak berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pemerintah daerah.
- H_{a4} : PAD, Belanja Modal dan SILPA berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pemerintah daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif, yaitu untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), belanja modal dan dana SILPA terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian ini akan di laksanakan pada Provinsi Sumatera Selatan dengan mengambil sampel Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2012-2016 dengan lokasi pengambilan data pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel adalah objek penelitian yang mempunyai ciri yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Maka Variabel dalam penelitian ini adalah :

- (X₁) = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- (X₂) = Belanja Modal
- (X₃) = Dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
- (Y₁) = Kinerja Pemerintah Daerah

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling secara *nonprobabilitas* dengan cara *purposive sampling* yaitu :

1. Laporan realisasi anggaran pemerintah daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Selatan

tahun 2012-2016 berupa PAD, Belanja Modal dan SILPA. (17 Kabupaten/Kota)

2. Laporan EKPPD dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2012-2016. (15 Kabupaten/Kota)

Maka yang memenuhi syarat menjadi sampel yang memiliki keduanya yaitu Laporan LRA dan EKPPD maka terdapat 15 Kabupaten/Kota di kalikan 5 tahun (15 x 5) yaitu 75 Sampel.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari artikel, jurnal, penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya dan Laporan APBD Kabupaten Kota se-Provinsi Sumatera Selatan 2012-2016 serta Penilaian EKPPD dari Kementerian Dalam Negeri 2012-2016.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik dokumentasi di mana dokumentasi yang digunakan adalah laporan realisasi anggaran (LRA) yang di dapat dari www.djpk.kemenkeu.go.id Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dan nilai EKPPD Provinsi Sumatera Selatan yang didapat dari penilaian Kemendagri pada tahun 2012-2016.

Teknik Analisis Data

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk apakah dalam regensi variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan P-P plot test.

Uji Multikolonieritas

Menurut M. Burhan (2017) uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji multikolonieritas dapat dilakukan dengan cara melihat *tolerance value* dan *Variance Inflation Faktor* (VIF).

Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dapat dilakukan dengan metode grafik dan uji Durbin-Watson.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara mendeteksinya adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatterplot* antara SRESID dan ZPRED.

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model persamaan regresi linier berganda yang digunakan adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2014) :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2 X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

- Y** = Kinerja pemerintah daerah
- a** = *constant*
- b₁** = Koefisien regresi antara PAD dengan kinerja pemerintah daerah
- b₂** = Koefisien regresi antara belanja modal dengan kinerja pemerintah daerah
- b₃** = Koefisien regresi antara SILPA dengan kinerja pemerintah daerah
- X₁** = Variabel PAD
- X₂** = Variabel belanja modal
- X₃** = Variabel SILPA
- e** = *error disturbances*

Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji-t)

Pengujian terima H_0 jika $t_{hitung} < t_{tabel (1-\alpha)}$ dan nilai $t_{sig} > 0,05$ dan ditolak H_0 jika $t_{hitung} > t_{tabel (1-\alpha)}$, dan $t_{sig} < 0,05$. H_a di terima jika $t_{hitung} > t_{tabel (1-\alpha)}$ dan nilai $t_{sig} < 0,05$ dan H_a ditolak jika $t_{hitung} < t_{tabel (1-\alpha)}$, dan $t_{sig} > 0,05$. Dimana $t_{(1-\alpha)}$ adalah t yang didapat dari table distribusi t dengan $dk = n-k$, dan peluang $(1-\alpha)$ dengan $\alpha = 0,05$.

Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji-F)

Uji secara simultan adalah uji secara bersama antara variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara variabel tersebut. Pengujian terima H_0 jika $F_{hitung} < F_{tabel (1-\alpha)}$ dan nilai $F_{sig} > 0,05$ dan ditolak H_0 jika $F_{hitung} > F_{tabel (1-\alpha)}$, dan $F_{sig} < 0,05$. H_a di terima jika $F_{hitung} > F_{tabel (1-\alpha)}$ dan nilai $F_{sig} < 0,05$ dan H_a ditolak jika $F_{hitung} < F_{tabel (1-\alpha)}$, dan $F_{sig} > 0,05$. Dimana $F_{(1-\alpha)}$ adalah F yang didapat dari tabel distribusi F dengan $dk = n-k-1$, dan peluang $(1-\alpha)$ dengan $\alpha = 0,05$.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data dengan variable independennya dalam bentuk rupiah dan hasil penilaian kinerja pemerintah daerah dalam bentuk skor kinerja maka data tersebut diatas dirubah kedalam skala persentase. Pertama yaitu PAD ($X_1 = \text{Total PAD/Pendapatan} \times 100$). Belanja modal ($X_2 = \text{Total Belanja Modal/Belanja} \times 100$). SILPA ($X_3 = \text{SILPA/Total Pendapatan} \times 100$). Sedangkan untuk

skor kinerja yaitu ($Y = \text{skor kinerja}/4 \times 100$) yang mana 4 merupakan skor maksimal dalam penilaian kinerja.

Hasil dari persentase tersebut di uji dengan metode pengujian yaitu pertama uji asumsi klasik, uji

regresi linear berganda dan uji hipotesis secara parsial dan simultan menggunakan SPSS versi 23 tahun 2018

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 1.
Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	66.273	3.935		16.843	.000
PAD	.246	.154	.188	1.598	.115
MODAL	.172	.118	.186	1.455	.150
SILPA	-.516	.150	-.408	-3.429	.001

a. Dependent Variable: EKPPD

Sumber : *Pengelolaan Data 2018*

Berdasarkan data tabel 1. di atas diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2 X_2 + b_3X_3 + e$$

$$= 66.273 + 0.246 (X_1) + 0.172 (X_2) + (-0.516) (X_3) + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda, maka dapat di interpretasikan sebagai berikut :

- Nilai konstanta (a) sebesar 66.273 mempunyai arti bahwa jika perubahan PAD (X_1), Belanja Moda (X_2) dan SILPA (X_3) adalah nol, maka perubahan penilaian kinerja daerah sebesar 66.273.
- Koefisien regresi variabel X_1 pendapatan asli daerah (PAD) di peroleh sebesar 0.246 dengan arah koefisien positif. Hal ini menunjukkan bahwa PAD memiliki hubungan yang searah dengan penilaian kinerja daerah. Setiap perubahan sebesar satu persen pada penilaian kinerja daerah maka besarnya kinerja daerah mengalami perubahan yaitu peningkatan sebesar 0.246 dengan asumsi bahwa variabel

independen lain dalam model regresi ini adalah tetap.

- Koefisien regresi variabel X_2 belanja modal di peroleh sebesar 0.172 dengan arah koefisien positif. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal memiliki hubungan yang searah dengan penilaian kinerja daerah. Setiap perubahan sebesar satu persen pada penilaian kinerja daerah maka besarnya kinerja daerah mengalami perubahan yaitu peningkatan sebesar 0.172 dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam model regresi ini adalah tetap.
- Koefisien regresi variabel X_3 SILPA di peroleh sebesar -0.516 dengan arah koefisien negatif. Hal ini menunjukkan bahwa SILPA memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan penilaian kinerja daerah. Setiap perubahan sebesar satu persen pada penilaian kinerja daerah maka besarnya kinerja daerah mengalami perubahan yaitu penurunan sebesar -0.516 dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam model regresi ini adalah tetap

Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Tabel 2.
Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji-t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	Std. Error				
	B		Beta		
1 (Constant)	66.273	3.935		16.843	.000
PAD	.246	.154	.188	1.598	.115
MODAL	.172	.118	.186	1.455	.150
SILPA	-.516	.150	-.408	-3.429	.001

a. Dependent Variable: EKPPD

Sumber : Pengelolaan Data 2018

Maka berdasarkan data tabel di atas dapat kita interperetasikan hasil uji hipotesis sebagai berikut :

a. Pengujian Variabel Pendapatan Asli Daerah (X₁)

Hasil uji hipotesis PAD terhadap penilaian kinerja pemerintah daerah di dapat nilai signifikan PAD t_{sig} 0,115 > 0,05 dan nilai t_{hitung} 1,598 < 1,994 t_{tabel}, maka H₀₁ diterima dan H_{a1} ditolak yang artinya Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012-2016.

b. Pengujian Variabel Belanja Modal (X₂)

Hasil uji hipotesis belanja modal terhadap penilaian kinerja pemerintah daerah di dapat nilai signifikan t_{sig} 0,150 > 0,05 dan nilai t_{hitung} 1,455 < 1,994 t_{tabel}, maka H₀₂ diterima dan H_{a2} ditolak

yang artinya belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012-2016.

c. Pengujian Variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X₃)

Hasil uji hipotesis SILPA terhadap penilaian kinerja pemerintah daerah di dapat nilai signifikan SILPA t_{sig} 0,001 < 0,05 dan nilai t_{hitung} 3,429 > 1,994 t_{tabel}, dengan arah yang negatif maka H₀₃ ditolak dan H_{a3} diterima dengan arah yang negatif yang artinya SILPA berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012-2016. Yang artinya jika SILPA mengalami peningkatan sebesar satu persen maka penilaian kinerja pemerintah daerah mengalami penurunan sebesar 3,429 persen.

Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012-2016.

Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji-F)

Tabel 3.
Uji Regresi Linear Berganda (uji-F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	562.962	3	187.654	4.908	.004 ^b
Residual	2714.381	71	38.231		
Total	3277.342	74			

a. Dependent Variable: EKPPD

b. Predictors: (Constant), SILPA, PAD, MODAL

Sumber : Pengelolaan Data 2018

Berdasarkan table di atas di dapat nilai F_{sig} 0,004 < 0,05 dan F_{hitung} 4,908 > 2,73 F_{tabel}, maka H₀₁ ditolak dan H_{a1} diterima yang artinya bahwa PAD, belanja modal dan SILPA berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pemerintah daerah

Pembahasan Hasil Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Sumawan dan Sukarta (2016) dalam Ni Putu Gina (2018: 1086) berpendapat bahwa peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah yang tinggi setiap tahunnya menunjukkan pula tingginya sumber keuangan yang dimiliki daerah. Jika sumber keuangan yang dimiliki mampu dimanfaatkan dan dikelola dengan optimal maka memberikan cerminan kinerja dari pemerintah daerah. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya menurut Cherya D Wenny (2012) yang meneliti tentang PAD yang menyatakan terdapat pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yang mana peningkatan dalam PAD maka dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Dalam penelitian ini, Pendapatan Asli Daerah tidak ada pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dan tidak berhasil mendukung teori dan penjelasan pada penelitian sebelumnya di atas dimana kinerja pemerintah daerah tidak sejalan dengan kinerja keuangan daerah. Tidak adanya penelitian yang sejenis untuk membandingkan hasil penelitian, maka peneliti mengambil teori menurut Mardiasmo (2009) faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah yaitu tingkat efektifitas diukur dari efisiensi rasio inputs dan outputs. Maka tidak ada pengaruhnya terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dikarenakan kurang efektif dan efisiennya pengelolaan PAD sebagai inputs terhadap outputs yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012-2018.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Ni Putu Gina (2018:1088) berpendapat bahwa tingginya belanja modal menyebabkan semakin tinggi pula produktivitas perekonomian yang dalam hal ini adalah kinerja keuangan daerah. Hal yang sama di dapat dari penelitian sebelumnya menurut Mulia Mulia (2016) yang meneliti tentang belanja modal, dana perimbangan, PAD yang menyatakan terdapat pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini, belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah yang mana tidak berhasil mendukung teori dari penelitian sebelumnya di atas. Dimana kinerja pemerintah daerah tidak sejalan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurut Abdul (2014:228-229) ukuran keberhasilan dari setiap kegiatan belanja modal adalah mutu yang diberikan sesuai yang diharapkan, suatu yang dihasilkan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan mengacu pada kepentingan publik. Maka tidak adanya pengaruh antara belanja modal terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan disebabkan belanja modal yang dilakukan Kabupaten/Kota kurang mengacu pada kepentingan publik sehingga dampak dari belanja modal kurang dirasakan masyarakat. Peningkatan dana yang digunakan untuk belanja pemerintah tanpa peningkatan yang sesuai dengan pendapatan pemerintah yang tidak mengacu pada kepentingan publik akan sia-sia dan bisa menyebabkan defisit (Darwanis dan Ryanda, 2014).

Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut PP No.71 tahun 2010 tentang Sistem Akutansi Pemerintahan SILPA merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan yaitu selisi antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam APBD angka SILPA ini harusnya sama dengan nol. Yang artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi, sehingga seluruh anggaran terserap dengan baik dan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini, SILPA berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan maka hasil penelitian ini dapat mendukung teori yang disampaikan diatas yang mana semakin tinggi SILPA akan berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012-2016. Hasil ini juga didukung oleh peneliti sebelumnya menurut Sihar Simamora yang meneliti tentang SILPA, Penerimaan dan Pengeluaran yang menyatakan terdapat pengaruh terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh PAD, Belanja Modal dan SILPA terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Ni Putu Gina (2018:1092) berpendapat pendapatan asli daerah dapat meningkatkan pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan belanja daerah. Menurut Abdul (2014) pengalokasian belanja yang sesuai dengan rasio APBD dapat menekan defisit pada SILPA.

Dalam penelitian ini, PAD, belanja modal dan SILPA secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012-2016. Penelitian ini tidak ada pembandingan dengan hasil penelitian sebelumnya karena tidak adanya penelitian yang sejenis dan identik. Indikator dalam menentukan kinerja pemerintah daerah ada lima indikator yaitu : masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impacts*). Selain lima indikator utama tersebut terdapat sub-sub indikator di setiap indikatornya. Penelitian ini hanya menitik beratkan kepada sub indikator dari inputs berupa dana yaitu PAD dan SILPA sedangkan pengeluaran *outputs* belanja modal. Sedangkan untuk indikator yang lain tidak diukur dalam penelitian ini. Sehingga tidak berpengaruh secara simultannya antara PAD, belanja modal dan SILPA terhadap kinerja pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), belanja modal dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012–2016 dengan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 15 sampel dengan kesimpulan tidak ada pengaruh antara pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012-2016. Tidak ada pengaruh antara belanja modal terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012-2016. Terdapat pengaruh dengan arah yang negatif antara sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012-2016. Terdapatnya pengaruh secara simultan antara PAD, belanja modal dan SILPA terhadap kinerja pemerintah daerah dengan demikian jika ada perubahan antara PAD, belanja modal dan SILPA maka akan mempengaruhi juga penilaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012-2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2014. *Menejemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Asmaul Aziz. 2016. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur)*. Mojokerto: Universitas Islam Majapahit Vol XI No 1, 2016.
- Chabib Soleh dan Surtpto**. 2011. *Menilai Kinerja Pemerintah Daerah* Jatinangor: FOKUSMEDIA
- Cherrya D Wenny. 2012. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang Vol. 2 No. 1 September 2012.

Deddi Nurdyawan. 2008. *Akutansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat

Fifit Purnama dan Nadirsyah. 2016. *Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten Aceh Barat Daya*. Kuala: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 1, No. 2, (2016) Halaman 01-15.

Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, tentang Belanja Daerah

MenPAN tahun 2007 tentang Kinerja Pemerintah Daerah

M. Burhan Abidin. 2017. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan*. Fakultas Ekonomi dan Bisni UNILA: Lampung

Mardiasmo. 2009. *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*. Makalah. Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat.

Muhammad Yasin. Slamet Riyadi. Ibrahim Ingg. 2017. *Analisis Pengaruh Struktur APBD Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten dan Kota Se-Jawa Timur*. Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Volume 2, Nomor 2, September 2017.

Mulia Andirfa. 2016. *Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota Di Provinsi Aceh*. Aceh: Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Ni Putu Gina Sukma Antari. 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. E Jurnal Manajemen: UNUD Vol 7 : 1080-1110

Sri Mulyani, dan Wibowo Hardiyanto. 2017. *Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah,*

Intergovernmentalrevenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa

Tengah, Tahun 2012-2015). Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Sumber Keuangan Daerah

Undang-undang No. 32 tahun 2004 pasal 157 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang SILPA

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran Belanja Modal

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Permendagri 13 tahun 2006 pasal 137 tentang SILPA

Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000, tentang Keuangan Daerah